

IMPLEMENTASI E-AUDIT DALAM MENINGKATKAN FUNGSI PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA BPK-RI

Alvita U. Pradita
alcyaphita@gmail.com
Universitas Negeri Surabaya

Abstract

Financial examination process of Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) takes too much time. At the same time, the BPK is required to report the results of the examination or accountability immediately. Therefore, BPK is seeking to improve the quality of examination of financial management and accountability of the state through e-audit system. This paper explains how e-audit synergy mechanism and benefits of the implementation of e-audit on the financial management and barriers in implementing e-audit based on literature studies. E-audit is a monitoring process through the BPK data center by combining existing electronic data on BPK with auditee electronic data. Thus, the BPK will be able to run the recording, processing, exchange, and use of monitoring data from various parties, in order to carry out inspection tasks for the management and accountability of state finance electronically.

Keywords: *e-audit, financial examination, financial management, accountability, synergy e-audit.*

PENDAHULUAN

Sesuai dengan salah satu rencana strategis BPK-RI yang tercantum dalam Rencana Strategis BPK periode 2011-2015 yaitu mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya memaksimalkan tugas pemeriksaan pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara (BPK, 2011b). Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, BPK perlu memperbesar dan membangun kapasitas kelembagaan mereka. Undang-undang ini telah memaksa BPK untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan lebih ekonomis, efisien, efektif, transparan,

dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan audit. Salah satu upaya untuk merealisasikan rencana tersebut adalah dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah memberikan banyak keuntungan pada berbagai bidang. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, semua organisasi atau perusahaan membutuhkan informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Dalam upaya meningkatkan kualitas pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara, BPK telah mulai membangun sistem pemeriksaan keuangan negara berbasis sistem teknologi informasi. Teknologi informasi yang digunakan BPK diharapkan tidak hanya digunakan sebagai *supporting* tetapi juga wajib digunakan sebagai *enabler* dalam mendukung kinerja pemeriksaan BPK (Hartoyo, 2011).

Berdasarkan konstitusi, BPK-RI dibentuk untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada perkembangannya, jumlah entitas pengelola keuangan negara dan jumlah keuangan negara dari tahun ke tahun semakin bertambah. Kondisi yang demikian tidak saja menuntut penggunaan sistem dan teknologi pengelolaan keuangan negara yang tepat, melainkan juga sistem dan teknologi pemeriksaannya oleh BPK-RI.

Upaya pemerintah dalam menanggapi permasalahan tersebut, pada tahun 2009, BPK mulai mengembangkan sistem baru yang disebut e-audit (elektronik audit). Sistem ini bertujuan untuk membantu BPK dalam melakukan misi utama mereka, yaitu pemeriksaan, pengelolaan, pelaporan dan memberikan pendapat mengenai pernyataan pemeriksaan untuk kepentingan publik atau *stakeholder*

(Purnomo, 2011). BPK mulai menerapkan sistem e-audit sejak pertengahan 2010 dan sudah beberapa entitas diaudit menggunakan sistem ini. Berdasarkan pernyataan Ketua BPK Hadi Poernomo pada penandatanganan Nota Kesepahaman dengan dua puluh tiga Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara bahwa hingga saat ini, semua entitas yang terdiri dari tiga entitas legislatif, tiga entitas yudikatif, tiga puluh empat entitas kementerian, empat puluh dua entitas nonkementerian, 148 entitas BUMN atau BUMD, dan 519 entitas Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota telah diaudit dengan sistem e-audit (Purnomo, 2013).

Selama ini, proses pemeriksaan keuangan BPK mengalami beberapa hambatan misalnya, waktu pemeriksaan yang terlalu lama sedangkan BPK dituntut untuk segera memberikan laporan hasil pemeriksaan atau laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut terjadi karena lambatnya dokumen-dokumen untuk pemeriksaan sampai kepada BPK. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga sangat rentan terhadap tindak penyelewengan.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK RI mendapat kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 9 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yang antara lain memberikan hak kepada BPK RI untuk meminta data atau dokumen kepada pihak yang diperiksa (*auditee*) dan atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah perolehan data dokumen tersebut, BPK RI memprakarsai pembentukan sinergi data dengan *auditee* melalui strategi *link and match* data (BPK, 2011a).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas bagaimana sinergi BPK dengan sistem e-audit, implementasi e-audit dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban berbasis e-audit, serta hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan e-audit.

Fungsi Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pemeriksaan keuangan negara yang sesuai dengan standar pemeriksaan dan peraturan perundang-undangan menjadi dasar dalam pelaksanaan serta penilaian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksaan merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, jenis-jenis pemeriksaan ada tiga, yaitu:

1. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas informasi yang disajikan di laporan keuangan secara wajar, dan aspek-aspek materialnya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Di sini pemeriksa menguji pengendalian intern dan ketaatan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan kinerja menghasilkan informasi yang berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja suatu program dan memudahkan proses pengambilan keputusan serta pengawasan untuk selanjutnya melakukan tindakan koreksi yang diperlukan untuk mencapai tujuan awal yaitu efisiensi dan efektivitas. Pemeriksaan kinerja menghasilkan temuan, simpulan, dan rekomendasi.

3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa oleh pemeriksa. Pemeriksaan ini berupa eksaminasi, reviu, atau prosedur yang disepakati. Hal ini meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian internal.

Dari pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, dapat diketahui bagaimana pelaksanaan dan evaluasi terhadap tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengawasan dijadikan sebagai alat pemastian untuk tercapainya tujuan secara efektif dan efisien (Suseno, 2010). Pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengelolaan keuangan negara. Segala urusan kepentingan negara, khususnya dalam hal keuangan negara, harus diiringi dengan pengawasan yang tepat agar pelaksanaan, pengelolaan dan tanggung jawab dapat berjalan sesuai

dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi negara.

Pengelolaan keuangan daerah dibagi menjadi tiga proses besar. Tiga proses tersebut adalah perencanaan (termasuk didalamnya aktifitas penetapan APBD/penganggaran), penatausahaan (proses pelaksanaan APBD) dan pelaporan (pertanggungjawaban APBD). Proses akuntansi merupakan bagian dari aktifitas pelaporan yang mengharuskan setiap pengguna anggaran/pengguna barang untuk melaporkan seluruh transaksi ke dalam laporan keuangan. Struktur APBD terdiri dari penerimaan daerah yang dirinci berdasarkan urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan (Barata dan Bambang, 2005).

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan di bidang keuangan negara yang meliputi perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Salah satu upaya konkrit yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Dalam Undang-Undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaknya

tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Sebelumnya, permasalahan terkait terlambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut sering terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban masih kurang efektif dan efisien. Perlu diadakan penelusuran dan evaluasi kembali mengenai penyebab keterlambatan penyampaian laporan tersebut.

Pemeriksa Keuangan dan Tanggung Jawab Pemeriksa

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, menjelaskan bahwa pemeriksa adalah orang atau pihak yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Pemeriksa akan melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Tanggung jawab pemeriksa sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 *Standar Pemeriksaan*, pemeriksa bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas,

obyektivitas, dan independensi. Kemudian, pemeriksa harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan, melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan derajat integritas tertinggi, profesional, obyektif, berdasarkan fakta, dan tidak berpihak.

Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, dinaungi oleh organisasi di atasnya. Organisasi pemeriksa mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa: (1) independensi dan obyektivitas dipertahankan dalam seluruh tahap pemeriksaaan; (2) pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan; (3) pemeriksaan dilakukan oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai; (4) *peer review* yang independen dilaksanakan secara periodik.

Badan Pemeriksa Keuangan selaku Pemeriksa Keuangan Negara

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi (BPK, 2008).

Badan Pemeriksa Keuangan selaku pemeriksa keuangan, adalah Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BPK adalah lembaga audit tertinggi independen yang tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah, parlemen atau lembaga lain. Pada prinsipnya, tujuan dari lembaga ini adalah untuk melaksanakan evaluasi, pemeriksaan, dan melakukan set sendiri audit programmer di tingkat negara bagian dan lokal (Hartoyo, 2011).

Undang Undang Dasar 1945 Bab VIII A Pasal 23 E, 23 F, dan 23 G, dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberi mandat dan tugas bagi BPK RI untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Ruang Lingkup Pemeriksaan Keuangan BPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, ruang lingkup pemeriksaan yang menjadi tugas BPK adalah pemeriksaan keuangan negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab negara yang mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu: (1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; (2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; (3) Penerimaan negara; (4) Pengeluaran negara; (5) Penerimaan daerah; (6) Pengeluaran daerah; (7) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah; (8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; (9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah (BPK Kendari, 2012).

Pemeriksaan kinerja oleh BPK adalah pemeriksaan kinerja atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah (BPK, 2011b). Pasal 23 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif (BPK Kendari, 2012). Selanjutnya, pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK yang meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah (BPK Kendari, 2012).

Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan Negara oleh BPK

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara, sesuai dengan Pasal 10 huruf a dan b UU Nomor 15 Tahun 2004, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan atau dokumen yang wajib diberikan setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Selain itu, BPK juga berhak mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 juga menjelaskan bahwa BPK dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan atau unsur pidana. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suatu instansi pemerintah atau pejabat pemerintah dikatakan telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dapat dilihat dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (Rampengan, 2013).

E-Audit (Elektronik Audit) sebagai Sistem Pemeriksaan Berbasis Elektronik

E-audit BPK merupakan pengawasan melalui pusat data BPK dengan cara mensinergikan data elektronik yang ada di BPK dengan data elektronik yang ada di pihak yang diperiksa oleh BPK, antara lain kementerian, lembaga negara, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan instansi lain yang diperiksa oleh BPK. E-Audit menggunakan kolaborasi sinergis data antara BPK dan badan audit yang nantinya akan menghasilkan komunikasi data antara BPK dan entitas pemeriksaan melalui akses internet (BPK Palembang, 2011).

E-audit dapat mempercepat proses pemeriksaan, sehingga diharapkan pemeriksaan tersebut lebih efisien dan hasilnya akan lebih efektif. Hasil pemeriksaan BPK akan lebih cepat disampaikan dan ditindaklanjuti oleh *auditee* BPK, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang transparan dan akuntabel akan cepat terwujud (BPK, 2013a). Jika dibandingkan dengan sebelum adanya penerapan e-audit, pihak pemeriksa atau BPK dan pihak yang diperiksa (entitas/*auditee*) akan lebih mudah melakukan pertukaran data baik untuk proses pemeriksaan maupun pertanggungjawaban.

Mekanisme Sistem E-audit

Jaringan internet dalam sistem e-audit merupakan hal yang sangat penting karena dalam jaringan tersebut, BPK selaku pemeriksa akan memperoleh data atau yang diperlukan dalam pemeriksaan dari entitas yang diperiksa (*auditee*). Sementara itu, entitas yang diperiksa akan mendapatkan hasil temuan audit berupa laporan dari BPK melalui jaringan internet (Praseno, 2012). Subowo (2011) memaparkan mekanisme atau proses e-audit adalah sebagai berikut: (1) Data yang

diperlukan untuk audit disiapkan oleh entitas audit. Data tersebut akan dikirimkan menggunakan jaringan internet dan akan terhubung dengan portal e-audit BPK;

(2) Selanjutnya, data awal dari entitas audit tersebut akan diakses oleh bagian pusat perintah BPK e-audit. Bagian pusat pengolahan data akan menggunakan suatu aplikasi untuk menganalisis data awal yang kemudian akan diunggah dan disimpan ke *database* BPK;

(3) Selama kegiatan yang terjadi dalam proses pemeriksaan menggunakan e-audit ini, tim perencanaan dan tim penilai akan berkoordinasi untuk melakukan pengawasan dan evaluasi aktivitas-aktivitas terkait prosedur audit;

(4) Setelah data terkumpul dan tersimpan dalam database BPK, tim pemeriksa atau auditor akan mengakses data dari database BPK dan kemudian memeriksa, menyesuaikan dan menilai data-data tersebut sesuai dengan prosedur pemeriksaan dan standar pemeriksaan;

(5) Tim audit BPK dapat meminta tambahan data yang diperlukan dari pusat pengolahan data untuk tujuan kelengkapan data atau dokumen selama proses pemeriksaan;

(6) Tim audit BPK akan melakukan prosedur konfirmasi, klarifikasi, rekonsiliasi, dan verifikasi berdasarkan hasil temuan audit;

(7) Setelah itu, tim audit BPK akan mengeluarkan laporan audit yang kemudian akan diberikan ke pusat pengolahan data untuk diunggah ke portal audit;

(8) Entitas audit (*auditee*) dapat mengakses temuan audit atau laporan tersebut dan berkomunikasi dengan BPK auditor melalui portal e-audit.

Sinergi BPK terhadap Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Bebas E-audit

Sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (e-audit) melalui sebuah komunikasi data secara *online* dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pusat Data BPK), yang kemudian disebut dengan Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI). SNSI digunakan sebagai instrumen pendeteksi dini secara sistemik (*early warning system*) melalui monitoring, analisis, dan evaluasi seluruh transaksi keuangan negara sehingga melalui pemeriksaan secara elektronik (e-audit) ketidakwajaran pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terjadi dapat diketahui secara dini, lebih cepat dan menyeluruh (BPK Palembang, 2011).

Adanya sinergi data antara BPK dengan pihak yang diperiksa, BPK dapat menjalankan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan pemantauan data dari berbagai pihak, dalam rangka melakukan tugas pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Penerapan BPK Sinergi ini diperkuat dengan adanya *link and match strategy* (Purnomo, 2013). Strategi ini dimulai dari mengidentifikasi sumber informasi yang diperlukan oleh BPK dari pihak yang diperiksa. Sumber informasi bisa berupa data dan informasi keuangan maupun nonkeuangan. Selanjutnya, data ini diolah dan digunakan dalam proses pemeriksaan secara elektronik atau e-audit BPK.

Hasil pengolahan data tersebut selanjutnya digabungkan dengan data dan informasi yang didapat dari pihak yang diperiksa. Pencanangan BPK Sinergi ini perlu karena jumlah entitas pemeriksaan BPK banyak dan harus diperiksa dalam

waktu yang singkat. Di sisi lain, jumlah pemeriksa BPK per 1 Desember 2010 hanya sebanyak 2.717 orang (BPK Palembang, 2011). Sedangkan, jangka waktu pemeriksaan atas laporan keuangan paling lama dua bulan, sehingga harus ada efisiensi dan efektifitas dalam prose pemeriksaan. Oleh karena itu, BPK Sinergi menjadi perlu dilakukan agar dapat tercapai proses pemeriksaan yang efektif dan efisien.

BPK melaksanakan kesepakatan bersama dengan pihak yang diperiksa melalui nota kesepahaman untuk mempermudah pembentukan BPK Sinergi. Sampai saat ini, BPK telah menjalin nota kesepahaman dengan enam Lembaga Negara, dua puluh sembilan Kementerian Negara/Lembaga, dan empat BUMN (Purnomo, 2013). Nota kesepahaman ini tidak mengatur kewenangan atau perizinan akses oleh BPK atas data pihak yang diperiksa. Namun, sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, BPK mempunyai kewenangan untuk meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap individu, organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola uang negara. Dengan kata lain, tanpa nota kesepahaman pun idealnya BPK tetap berwenang mengakses data apapun ke pihak yang diperiksa. Nota Kesepahaman tersebut hanya mengatur mengenai tata cara pengaksesan data. Pemeriksa BPK dapat melakukan akses data tanpa perlu datang ke pihak yang diperiksa atau pihak yang diperiksa harus datang untuk menyerahkan data-data tersebut, melainkan cukup dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh BPK dan pihak yang diperiksa (Purnomo, 2013).

Optimalisasi sinergi BPK dengan e-audit mengakibatkan luas pemeriksaan yang akan dilakukan dapat disesuaikan dan difokuskan pada bidang-bidang yang secara potensial berdampak pada kewajaran laporan keuangan serta tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara (Kamal, 2012). Untuk itu, aparat pengawasan intern pemerintah wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK. Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien serta laporan keuangan yang wajar akan meningkatkan tata kelola pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Implementasi E-audit terhadap Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Keuntungan penerapan e-audit yaitu efisiensi dan efektivitas pemeriksaan keuangan dapat ditingkatkan karena ruang lingkup pemeriksaan dapat diperluas dan pemeriksaan dapat berfokus pada beberapa daerah yang berisiko. Dalam hal tata kelola keuangan negara yang baik, e-audit dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. E-audit juga dapat mejadi sistem peringatan dini dalam pengelolaan keuangan negara yang baik (Purnomo, 2011).

Tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diharapkan lebih efisien dan efektif karena pertukaran data, proses pemeriksaan, dan pengawasan menjadi lebih mudah, tepat dan akurat. Adapun *output* yang dihasilkan dari implementasi e-audit bagi BPK, antara lain: (1) BPK memanfaatkan pusat data dari sistem e-audit dalam pemeriksaan terhadap entitas secara elektronik sehingga pemeriksaan bisa berjalan lebih efektif. terbentuknya pusat data BPK RI dengan menggabungkan data elektronik BPK RI dengan data elektronik entitas yang diperiksa (*auditee*), mempermudah pelaksanaan

pemeriksaan oleh BPK RI, dan mendorong transparansi dan akuntabilitas data entitas yang diperiksa (Hartoyo, 2011); (2) BPK akan mampu melakukan tugas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan lebih efisien karena adanya penghematan waktu pemeriksaan (Purnomo, 2011). Penghematan waktu terjadi karena dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pemeriksaan diperoleh BPK dengan mudah dan cepat akibat adanya sistem e-audit yang merekam data secara *real time* dan pertukaran data dengan cepat melalui jaringan internet (Hartoyo, 2011); (3) Dengan memanfaatkan pusat data, BPK akan lebih mudah melakukan pemeriksaan dan menelusuri transaksi keuangan harian entitas yang diperiksa dan menemukan bukti-bukti transaksi tersebut sehingga mampu mengetahui adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan keuangan negara secara dini; (4) Terkait fungsi pengelolaan keuangan negara, BPK akan mampu melaksanakan tugas perencanaan, penguasaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara efektif dan efisien; (5) BPK mampu memberikan laporan pertanggungjawaban dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara tepat waktu serta dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga berfungsi untuk meminimalkan penyalahgunaan keuangan, mencegah gejala korupsi dan sebagai alat bukti yang cukup kuat dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi (Rampengan, 2013).

Sementara itu, bagi entitas yang juga mengsinergikan data secara elektronik dengan data BPK juga akan mendapat beberapa keuntungan, antara lain: (1) Pusat data e-audit dimanfaatkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian satuan kerja yang ada. Dengan pusat data tersebut, ketidakcocokan data dapat diketahui sejak dini dan BPK RI memiliki data untuk dilakukan

pengecekan dalam *fieldwork* audit (BPK, 2013b). Dengan demikian, pemeriksaan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif karena waktu lebih cepat, data yang diperiksa lebih banyak (bisa seluruh atau sebagian populasi data dianalisis), serta sasaran pemeriksaan lebih tepat; (2) Hasil laporan pemeriksaan BPK yang lebih cepat disampaikan dan lebih efektif dapat digunakan oleh entitas untuk memperbaiki berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan secara lebih cepat dan efektif pula; (3) Dengan adanya komunikasi dan pertukaran data secara *on time*, *online*, dan *real time* akan mengubah citra dari pemeriksaan BPK yang sebelumnya bagi entitas dirasakan cukup memberatkan, menakutkan, dan merepotkan berubah menjadi suatu kebutuhan atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh entitas tersebut (Purnomo, 2013); (4) Rampengan (2013) menyatakan bahwa kebutuhan untuk melaksanakan pertanggungjawaban atas program menghendaki bahwa laporan hasil pemeriksaan disajikan dalam bentuk yang mudah diakses, sehingga pertukaran informasi antara entitas dengan BPK dapat saling menguntungkan.

Bagi pemerintah pusat dan daerah, implementasi e-audit memberi manfaat yang besar terhadap penyusunan maupun penggunaan anggaran. Melalui pelaksanaan e-audit akan terbentuk sebuah transparansi anggaran baik pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan pajak (Hayon, 2012). Adanya sinergi e-audit memberikan manfaat, antara lain: (1) Penyajian pelaporan keuangan lebih terpercaya karena transaksi harian diketahui oleh BPK; (2) Mampu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pajak sehingga penerimaan pajak dapat dimaksimalkan; (3) Efisiensi belanja daerah; (4) Belanja dan penerimaan pendapatan lebih transparan dan lebih dapat dipertanggungjawabkan; (5)

Meminimalkan potensi kerugian negara/daerah. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tersebut merupakan laporan audit BPK yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang hasil akhirnya menyatakan bahwa instansi pemerintah atau pejabat pemerintah tersebut telah melakukan penyelewengan dana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau tidak (Rampengan, 2013); (6) Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar lebih cepat dilakukan untuk memperbaiki kelemahan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Manfaat lainnya dari LHP adalah membuat hasil pemeriksaan sebagai bahan untuk melakukan tindakan perbaikan oleh instansi terkait (Rampengan, 2013).

Implementasi e-audit yang memberikan efisiensi dan efektivitas terhadap fungsi pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, diharapkan mampu mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan pelaporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Hambatan-hambatan dalam Mengimplementasikan E-audit

Pemakaian teknologi informasi dalam pelaksanaan proses audit tentunya memerlukan auditor yang memiliki keahlian di bidang sistem informasi komputer (Hartoyo, 2011). Keahlian auditor tersebut juga bergantung pada kesiapan pengguna. Menurut teori *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT), empat faktor yang mempengaruhi penerimaan pengguna terdiri dari: 1) harapan pengguna terhadap seberapa baik sistem tersebut dapat meningkatkan kinerja (*performance expectancy*), 2) tingkat kemudahan penggunaan sistem baru (*effort expectancy*), 3) kesadaran seseorang tentang adanya pengaruh orang lain

yang menggunakan sistem (*social influence*), dan 4) harapan pengguna tentang keyakinan bahwa infrastruktur organisasi dan teknis dapat mendukung berjalannya sistem (*facilitating condition*) (Venkatesh *et al.*, 2003).

Sarana dan prasarana Yang diperlukan dalam *piloting* e-audit adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Terdapat tiga perangkat keras yang mendukung piloting ini. Pertama, jaringan akses data ke media penyimpanan data *auditee*. Kedua, server tempat penyimpanan data baik yang sementara di portal e-audit dan *command centre* maupun yang bersifat permanen di pusat data. Ketiga, jaringan internet yang dibutuhkan tim audit untuk mengakses sistem e-audit. Sementara itu, perangkat lunak yang diperlukan terdiri dari *software* pada *command centre*, *software* pada *auditee*, dan *software* yang digunakan untuk proses audit (BPK, 2011a).

BPK mengalami beberapa hambatan terkait perkembangan teknologi yang mendasari sistem e-audit ini. Hambatan-hambatan yang kemungkinan akan terjadi, antara lain: (1) Kualitas jaringan internet. Selain keterbatasan media *interface*, masalah lain yang terjadi dalam pengembangan e-audit adalah kemungkinan terjadi koneksi internet yang buruk (Praseno, 2012); (2) Sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan sistem e-audit. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai dalam melakukan pemeriksaan menggunakan aplikasi program komputer mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan (Hartoyo, 2011); (3) Kesiapan sarana dan prasarana. *Hardware* (infrastruktur) sangat penting dalam pengembangan proyek e-audit, tetapi masih saja ditemukan keterbatasan *hardware* dan kebutuhan transmisi pada beberapa kantor BPK (Praseno, 2012); (4) Kesiapan dari semua

pihak-pihak yang terkait sinergi e-audit ini. Permasalahan lain dalam mengimplementasikan e-audit adalah masalah proses *link and match*, dimana dalam proses ini seringkali terdapat perbedaan *input* data dan perbedaan software atau aplikasi yang digunakan antara BPK dengan *auditee* (Praseno, 2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Sinergi e-audit pada BPK selaku pemeriksa dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. BPK dapat menjalankan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan pemantauan data dari berbagai pihak, dalam rangka melakukan tugas pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara elektronik. Hal tersebut secara langsung akan memengaruhi kualitas pemeriksaan menjadi semakin efektif dan efisien.

Pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien akan mampu mendeteksi, mencegah, dan mengatasi ketidakwajaran tata kelola keuangan, sehingga keuntungan lain dari adanya implementasi e-audit ini, yaitu: (1) Mengurangi potensi tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; (2) Mengoptimalkan penerimaan negara; (3) Menghemat pengeluaran negara; (4) Menjalankan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu secara maksimal; (5) Menindaklanjuti temuan BPK. Dengan demikian, misi BPK untuk memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara termasuk upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara dan pelaporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dapat tercapai dengan baik.

Dengan demikian, untuk memaksimalkan keberhasilan sistem e-audit ini, perlu adanya perbaikan terus menerus dari sistem teknologi dan dukungan semua pihak yang terkait sinergi e-audit ini. Selain itu, evaluasi dari BPK maupun entitas terkait sistem e-audit ini sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2008. Badan Pemeriksa Keuangan. Online: http://sikap.bpk.go.id/or_bpk.php. (diakses 10 April 2013).
- _____. 2011a. Menuju E-audit yang Paripurna. Online: www.bpk.go.id/web/files/2011/10/Hal-6-231.pdf. Diakses 10 April 2013.
- _____. 2011b. Rencana Strategis BPK 2011-2015. Online: http://www.bpk.go.id/web/?page_id=8 (diakses 05 Mei 2013).
- _____. 2013a. Implementasi E-Audit untuk Mencegah Korupsi. Online: <http://www.bpk.go.id/web/?p=14054> (diakses 10 April 2013).
- _____. 2013b. Siaran Pers BPK: BPK Mencegah Korupsi Melalui Sinergi Nasional Sistem Informasi. Online: www.bpk.go.id/web/?p=14686 (diakses 15 Mei 2013).
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kendari. 2012. Jenis – jenis Pemeriksaan. Online: <http://kendari.bpk.go.id/?p=1970> (diakses 10 Juni 2013).
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Palembang. 2011. Selayang Pandang E-Audit. Online: http://palembang.bpk.go.id/?page_id=7349 (diakses 09 April 2013).
- Barata, A. A. dan Bambang Trihartanto. 2005. *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hartoyo, A. Dwi. 2011. Upaya Peningkatan Kinerja Pemeriksaan BPK RI Menggunakan Computer Assited Audit Techniques. Online: <http://tif.bakrie.ac.id/pub/proc/eii2011/APT/APT-01.pdf> (diakses 24 Mei 2013).
- Hayon, E. Tome. 2012. Anggaran Daerah: E-Audit, Jokowi Senang Bisa Cegah Korupsi. Online: <http://en.bisnis.com/articles/anggaran-daerah-e-audit-jokowi-senang-bisa-cegah-korupsi> (diakses 20 Mei 2013).
- Kamal, Mustofa. 2012. Sinergi Reviu dan Audit Laporan Keuangan. Online: http://pusdiklatwas.bpkp.go.id/berita/a_88.html (diakses 20 Mei 2013)

Praseno, Arif. 2012. IT-Based Audit (e-Audit) Plan in Indonesia: An Analysis of the Program Logic, Feasibility, and Alternatives. Online: <http://thesis.eur.nl/pub/13105/> (diakses 10 Mei 2013).

Purnomo, Hadi. 2011. Impact of Technology Development in Strengthening Public Accountability and Transparency: The Audit Board of the Republic of Indonesia Experience. Sub-Theme 2. Online: <http://jointconference.sayistay.gov.tr/6/Indonesia-cp.pdf> (diakses 25 Mei 2013).

_____. 2013. E-Audit Semakin Masif. Online: <http://www.neraca.co.id/harian/article/> (diakses 10 April 2013).

Rampengan, M. C. 2013. Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi. Vol.2, No.2. Online: <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/1575>, (diakses 15 Mei 2013).

Subowo, Hery. 2011. Peningkatan Sinergi Antar Lembaga Melalui Implementasi E-Audit. Online: <http://www.depkeu.go.id/ind/others/bakohumas/BakohumasBPK/IndexBPK.html> (diakses 15 Mei 2013).

Suseno, Agung. 2010. Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Vol.17, Nomor 1 Online: <http://journal.ui.ac.id/jbb/article/viewFile/623/608>. (diakses 24 Mei 2013)

Venkatesh, V., M. G. Morris, G. B. Davis, F.D. Davis . 2003. *User Acceptance of Information Technology: Toward A Unified View*. Online: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=4D8A074FFC4029AFFBF306475CEBB469?doi=10.1.1.197.1486&rep=rep1&type=pdf> (diakses 15 Mei 2013).

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 *Standar Pemeriksaan*.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Keuangan Negara*.

_____. Nomor 15 Tahun 2004 *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

_____. Nomor 15 Tahun 2006 *Badan Pemeriksa Keuangan*.